

**PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN
BUPATI DI ACEH SELATAN TAHUN 2018**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ELISA JUSTIA

NIM. 140801013

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Politik**

**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2019 M/ 1440 H**

**PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN BUPATI DI
ACEH SELATAN TAHUN 2018**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar S-1 Pada Prodi Ilmu Politik

Oleh:

ELISA JUSTIA

Mahasiswa fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Pemerintahan

Prodi ilmu Politik

NIM : 140801013


Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I


Muji Mulia, M.Ag

NIP.197403271999031005

Pembimbing II


Aklina S.Fil.MA

NIDN.2006108802

Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati Aceh Selatan Tahun 2018

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/ Tanggal :


Selasa, 29 Januari 2019 M
Jumadil Awal 1440 H

di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

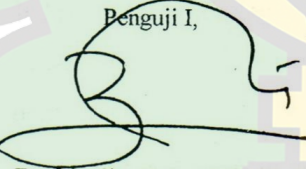
Sekretaris,

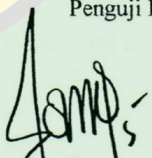

Dr. Muji Mulia, M. Ag
NIP. 197403271999031005


Aklima, S. Fil., MA
NIDN. 2006108802

Penguji I,

Penguji II,



Dr. Muslim Zainuddin, M.Si
NIP. 196610231994021001

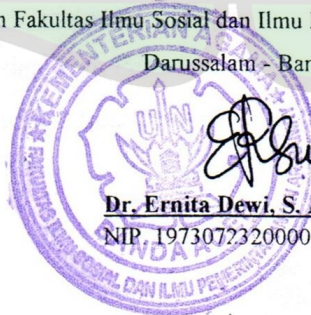

Ramzi Murzaqin, S. H. I., MA
NIDN. 2013058601

AR - RANIRY

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh


Dr. Ernita Dewi, S. Ag. M. Humi
NIP. 197307232000032002





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921
Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Elisa Justia
NIM : 140801013
Prodi / Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) UIN Ar-Raniry
Judul Skripsi : PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN
BUPATI ACEH SELATAN TAHUN 2018

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan Meinpertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang telah dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Januari 2019

Yang Menyatakan


Elisa Justia



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT karena dengan rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa kita mencurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya akhir zaman. Aamiin.

Penulis skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Skripsi hasil penelitian ini berjudul “ **PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN BUPATI ACEH SELATAN 2018**” Dalam penyelesaian skripsi ini peneliti banyak mendapat dorongan dan bantuan bimbingan dari berbagai pihak.

Ungkapan terimakasih tulus ikhlas penulis sampaikan kepada semua pihak dan orang-orang istimewa diluar dari pada penulis, yang tentu saja sudah banyak membantu penulis dalam memberi motivasi dan bimbingan dalam berbagai bentuk sehingga mendorong penulis supaya dapat menyelesaikan tugas akhir penulisan skripsi ini. Mungkin skripsi ini masih banyak kekurangan dan sudah pasti jauh dari kata sempurna, Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangatlah penting bagi peneliti. Kepada Allah SWT peneliti berserah diri dengan harapan semoga bermanfaat bagi peneliti sendiri dan pembaca semuanya. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus hati mengungkapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK.MA Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M. Hum. Selaku Dekan Fisip Uin Ar-Raniry.
3. Dr. Muji Mulia, M.Ag. Selaku Pembimbing pertama dalam penulis skripsi ini.
4. Aklima, S.Fil, MA. Selaku Pembimbing kedua dalam penulis skripsi ini yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan.
5. Kepada Ibunda dan ayahanda tercinta atas segala jasa-jasanya, motivasi, kesabaran, doa, cinta dan kasih sayang yang begitu tulus dan ikhlas kepada penulis. Dan juga ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara tercinta abang adi, kak eka, Dek Erna, yang telah banyak memberikan semangat, kasih sayang dan bantuan baik dari secara moral maupun material demi lancarnya penyusunan skripsi ini.
6. Sahabat saya Ulvia Rosiana, Wiwi Haslina, Riska, Dina Mardiana, Nurfitri, Rahma Aini Suci, Sulaimy dan teman sejawat Ilmu Politik Angkatan 2014. Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Aamiin aamiin yarabbal alamin...

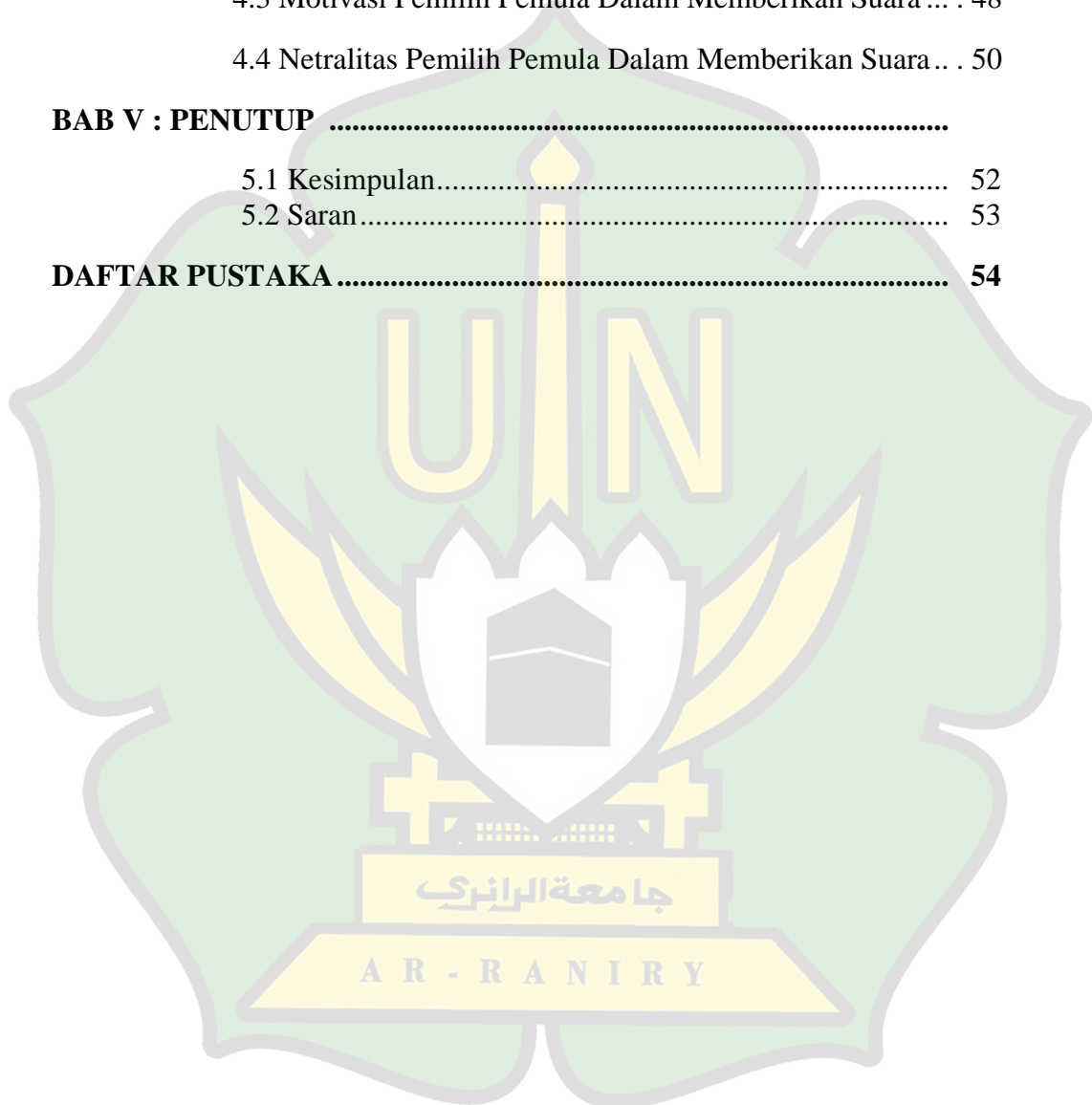
Banda Aceh, 28 Desember 2018

Elisa Justia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
ABSTRAK	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Kajian Pustaka	8
BAB II KERANGKA TEORI.....	10
2.1 Partisipasi Politik Pada Pemilukada	
2.2. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik	17
a. Partisipasi Konvensional	17
b. Partisipasi Non Konvensional	18
2.3 Pola Partisipasi Politik.....	18
2.4 Kendala Pemilih Pemula	25
a. Perilaku Pemilih	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Lokasi Penelitian	34
3.2 Metode penelitian	34
3.3 Jenis Penelitian	35
3.4 Fokus Penelitian	35
3.5 Pendekatan Dalam Penelitian	35
3.6 Teknik Pengumpulan Data	36
a. Wawancara	36
b. Dokumentasi.....	37
3.7 Teknik Analisa Data.....	37

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Peta Politik Di Kabupaten Aceh Selatan	39
a. Budaya Politik Di Kabupaten Aceh Selatan.....	40
b. Pendidikan Politik.....	43
4.2 Partisipasi Pemilih Pemula Di Aceh Selatan.....	43
4.3 Motivasi Pemilih Pemula Dalam Memberikan Suara ...	48
4.4 Netralitas Pemilih Pemula Dalam Memberikan Suara... .	50
BAB V : PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54



ABSTRAK

Skripsi ini menjelaskan mengenai partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan bupati di Aceh Selatan tahun 2018. Pada tahun 2013 jumlah partisipasi masyarakatnya sedikit menurun, tetapi menjelang pemilihan selanjutnya jumlah partisipasi masyarakatnya semakin meningkat termasuk partisipasi pemilih pemulanya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Samuel P. Huntington, yang menyatakan bahwa partisipasi politik dan pemilih adalah suatu penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan dalam pencapaian tujuan organisasi, serta mengambil bagian dalam setiap pertanggung jawaban bersama. Selain itu Huntington juga mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuat keputusan oleh pemerintah. penelitian ini dilakukan di Aceh Selatan tepatnya di kecamatan Pasie raja. Subjek dari penelitian ini adalah pemuda yang baru melakukan pemilihan dan berumur 17 tahun ke atas,serta salah satu tim sukses dari kandidat yang terpilih. Hasil dari penelitian ini menunjukkan yang pertama, partisipasi politik pemilih pemula meliputi seorang pemimpin harus memiliki pendidikan yang tinggi. Kedua, kesadaran politik yang tinggi dapat menciptakan perubahan yang baik untuk kedepannya. Oleh karena itu, pemilih pemula tentu saja mendapatkan kendala saat pemilihan yang membuat mereka menjadi sedikit berkurangnya percaya diri. Adapun salah satu kendala tersebut ialah muncul dari kalangan elit yang memberi perintah kepada bawahannya seperti tim sukses dapat mempengaruhi pikiran setiap pemilih pemula yang masih awam dengan pengetahuan politiknya.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pemilih Pemula, Dan Kendala Pemilih Pemula

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada pilkada serentak 2018 pemilihan bupati dan wakil bupati di Aceh Selatan yang di selenggarakan pada tanggal 27 Juni 2018 cenderung memiliki gaya gesekan berpotensi dapat menimbulkan situasi rawan bisa terjadi bila tidak diantisipasi secara efektif. Salah satu pemicu adalah faktor kewilayahan dan banyak kandidat yang maju dalam pilkada, misalnya wilayah meukek, dan sawang yang selama ini menjadi daerah kuat untuk perolehan suara.

Namun dengan muncul kandidat T.Sama Indra dan Azwir sehingga menjadi terpecah belah suara, yang dulunya sangat paten dalam memilih menjadi dua bagian antara kubu satu dan kubu lainnya.

Begitu juga dengan wilayah Labuhan Haji Raya dengan munculnya dua orang yang bertarung yaitu Mirwan Amir dan Zulkarnaini, sedangkan wilayah Kluet Raya Pilkada 2018 ini banyak yang berpartisipasi maju. Yaitu Karman, Darman, Harmaini, Tgk Husin Yusuf.

Banyaknya tokoh yang muncul menyebabkan pertarungan cukup ketat, apa lagi masih kentalnya sentimen perimodial kesukuan, relasi organisasi keagamaan dan emosional serta kedekatan keluarga.

Pada pilkada 2018 ini terdapat tujuh (7) calon kandidat yang diusung meramaikan pentas pemilihan kepala daerah di Aceh Selatan yang antaranya memiliki background kepemimpinan yang kuat seperti contohnya Bapak T. Sama Indra yang mencalonkan diri untuk periode kedua.

Ketujuh kandidat yang di usung naik sebagai mencalonkan diri menjadi Bupati Aceh Selatan 2018-2023 diantaranya yaitu : nomor urut pertama adalah pasangan Tgk.Husen Yusuf SPd.I dan wakilnya Dr. Mustafiril M.SI. Nomor urut kedua pasangan H. Azwir.S.sos dan wakilnya Tgk. Amran.

Pasangan nomor urut ketiga ialah Drs. Zulkarnaini M.SI dan wakilnya M. Jasa, pasangan keempat Darman.SP.MM dan wakilnya Baital Makmur SE. Nomor urut yang ke lima pasangan H.T. Sama Indra SH dan Wakilnya Drs. H. Harmaini M.SI, pasangan nomor urut yang keenam adalah H.Mirwan M.S.SE wakilnya Zirhan SP. Dan nomor urut yang terakhir nomor ke tujuh terdapat pasangan H.Karman BA.SE dan wakilnya Afdhal Yasin.

Pemilih yang baik dan benar ialah pemilih yang tidak melanggar prosedur hukum atas dasar kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok lainnya. Karena apabila masih mengedepankan kepentingan pribadi dari pada kepentingan umum suatu daerah maka daerah tersebut tidak akan pernah merasakan keadilan yang dilakukan oleh pemimpinnya.

Meskipun tahapan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Aceh Selatan periode 2018-2023 baru berlangsung pada pertengahan Juni 2018, tetapi suhu politik di negeri “Bumi Teuku Cut Ali” mulai menghangat.

Kalangan politikus dan pemerhati politik mulai membicarakan di warung-warung kopi, baik seputaran Kota tapaktuan maupun di kecamatan-kecamatan, tentang nama-nama tokoh diperkirakan akan ramaikan konteks demokrasi aceh selatan.

Dari ketujuh kandidat yang mencalonkan diri menjadi bupati Aceh Selatan, terdapat empat kandidat yang independen dan tiga darinya yang diusung oleh partai politik. Adapun tiga pasangan yang di usung oleh partai politik diantaranya adalah pasangan H. Azwir.S.sos dan wakilnya Tgk. Amran. Pasangan H.T. Sama Indra SH dan Wakilnya Drs. H. Harmaini M.SI, dan pasangan H.Mirwan M.S.SE wakilnya Zirhan SP.

Tidak menutup kemungkinan bahwasanya politik dapat diartikan berbagai variasi tergantung kacamata masyarakat melihat dari segi pandangan mereka masing-masing. Sangat tidak berhak oleh suatu pihak mengklaim bahwa pendapat atau pandangan orang lain itu salah terhadap defenisi politik itu sendiri.

Di karenakan hak dalam berpendapat itu sudah dimiliki dari semenjak lahir dari setiap manusia yang bernyawa berhak dalam menentukan proses kebijakan dalam masyarakat terhadap penguasa baik secara langsung maupun tidak langsung.¹

Menurut *Cheppy H. Cahyono* politik merupakan macam-macam kegiatan dalam sistem politik atau negara yang menyangkut dengan proses menentukan dan sekaligus melaksanakan tujuan-tujuan sistem tersebut. Politik juga diartikan sebagai proses interaksi dan aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan yang sah dan berlaku di tengah masyarakat.

¹Budiardjo, Miriam 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama

Hal-hal yang praktis akan digunakan dalam sistem perpolitikan tersebut, namun demikian walaupun perpolitikan yang berkembang saat ini khususnya di daerah Aceh Selatan cukup berpengaruh kedepannya atas dasar pengetahuan antar sesama masyarakat. Bisa dilihat antusias saat menjelang pilkada 2018 sudah sangat banyak iklan politik yang menyangkut dengan calon Kandidat yang mereka usung.

Tidak bisa dipungkiri sebagian mahasiswa juga ikut berbicara soal pilkada di Aceh Selatan, walaupun sudah jelas bahwasanya mahasiswa harus bersikap netral dalam memilih, namun pada dasarnya setiap manusia juga memiliki pilihan mereka sendiri baik itu karena hubungan keluarga maupun hubungan politik lainnya.

Mahasiswa sendiri yang sudah tidak awam lagi dalam memilih pasti memilih dengan cerdas sehingga tidak menimbulkan pekar yang tidak diinginkan seperti contohnya saja tidak terjadi golput saat memilih, tidak termakan hasutan yang di pondasikan oleh uang hanya semata-mata ingin mendapatkan suara dari individu tersebut.

Kegiatan yang dilakukan setiap lima tahun sekali ini (pilkada) menjadi jalan masyarakat dan semua pihak untuk dapat terakomodasi apa yang mereka inginkan dan yang di cita-citakan selama ini. Dengan adanya pilkada masyarakat lebih mudah dalam mengapresiasi hak serta keinginan yang mereka tuntut kepada calon pemimpin yang akan mereka pilih.

Dalam hal ini pihak masyarakat sangat menentukan nasib para kandidat yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau yang menduduki

kursi sebagai pemerintah yang bertujuan untuk mobilisasi antara masyarakat dengan pemerintah.

Meskipun demikian gejolak perpolitikan semakin mencuak saat menjelang waktu pemilihan. Selain dari kandidat itu sendiri Timses juga berperan aktif dalam memenangkan Kandidat mereka masing masing. Simpang siur dan saling menunjukkan bahwa team dari merekalah yang paling relevan untuk menduduki kursi kepemimpinan kedepannya.

Maka dari itu walaupun sudah terlihat aktif dari segi kepedulian masyarakat terhadap perpolitikan saat ini, masih banyak diantara masyarakat terlihat bodoh tanpa sengaja mereka masih memiliki sistem dimana kaum elit masih bisa mendikte jajaran muda untuk mengambil sikap yang tidak memiliki keuntungan sama sekali. Apalagi masyarakat yang masih awam dalam mengartikan sebuah pilkada.

Para Timses dari antar kandidat mulai kocar kacir mengeluarkan kemampuan mereka dalam mempengaruhi pikiran masyarakat supaya ikut menyuarakan aktor dari yang mereka dukung, sehingga masyarakat ikut dalam asuhan mereka sebagai yang berpihak ke kandidat yang dituju.

Usaha Timses untuk memenangkan kandidatnya pantas diacukan jempol, karena dilihat dari kaca mata sekarang pasangan antar bupati memiliki timses yang sangat aktif di media seperti timses dari Azwir dengan Pak Sama Indra yang sangat menonjol dari pada timses kandidat lainnya. Padahal selain dari pasangan antara dua kandidat ini masih terdapat lima pasangan lain yang ikut dalam kontes pencalonan kepala daerah di Aceh Selatan.

Bahkan selain dari itu, para timses antar kandidat saling menjatuhkan satu sama lain di akibatkan karena pilkada semakin dekat, diantara dari mereka bahkan pernah mengalami adu mulut di media sosial.

Hal ini sepatutnya tidak harus terjadi karena dapat menjatuhkan martabat seorang timses yang dipercaya sebagai alat untuk meraih kemenangan dari mereka bakal calon (Balon) dan juga dapat berdampak negatif dilihat oleh masyarakat sendiri, bahkan bisa saja masyarakat mengklaim hal tersebut adalah contoh yang tidak baik untuk dijadikan panutan sehingga masyarakat dapat seketika berubah haluan yang dulunya sangat antusias menjadi tidak peduli.

Bila dibandingkan dengan pemilihan bupati lima tahun belakang, masyarakat juga cukup antusias dan memiliki kepekaan terhadap berpolitik seperti sekarang, peningkatan ini mulai terasa saat dilihat bagaimana mereka ikut serta jika salah satu pasangan calon melakukan acara seperti contohnya ” Saweu Syedara Di Gampong” menjadi salah satu alasan bagi Elit dalam mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Hal itu dibuktikan langsung oleh pihak yang menjadi pengamat politik tren masa kini. Oleh karena itu partisipasi dari masyarakat Aceh Selatan sendiri, sejauh ini bisa di lihat dari kepekaan masyarakat sudah mulai terlihat baik itu dari segi keikutsertaan dan saling memberi masukan serta dapat melakukan hak dan kewajiban mereka sebagai warga masyarakat untuk menyukseskan pilkada.

Kontes pilkada saat menjelang pilkada sudah mulai terlihat di berbagai daerah dikabupaten Aceh Selatan, banyak dari mereka yang sudah mulai memberi sinyal positif bagi masyarakat sendiri guna dalam memikat hati masyarakat agar bisa mulai bergabung dari salah satu ketujuh bakal calon bupati Aceh Selatan yang sudah terdaftar dalam daftar nama calon bupati kedepannya.

Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwasanya kondisi di kabupaten Aceh Selatan masih dalam tingkatan normal meskipun sering terlintas dimata kita, para tim penguat dari berbagai calon saling menjatuhkan satu dengan yang lain guna untuk mendapatkan simpatisasi dari masyarakat setempat.

Dari ke tujuh bakal calon bupati Aceh Selatan 2018, yang cukup hangat diperbincangkan adalah pasangan Azwir dan pasangan Teuku Sama Indra dari bulan belakangan ini sangat banyak dibicarakan di media sosial, selain dari persaingan antara keduanya juga terdapat persaingan ketat antara tim-tim dari mereka yang saling memperlihatkan kepantasan calon mereka masing masing.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan bupati di Aceh Selatan tahun 2018?
2. Bagaimana kendala pemilih pemula pada pemilihan bupati di Aceh Selatan tahun 2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana partisipasi pemilih pemula pada pemilihan bupati Aceh Selatan 2018
2. Mengetahui sejauh mana kendala pemilih pemula yang diselenggarakan di Aceh Selatan pada pemilihan bupati tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dan netralitas terhadap pemilih pemula pada pemilihan bupati di aceh selatan pada tahun 2018.
 - b. Untuk menambah wawasan bagi penulis tentang bagaimana Partisipasi politik bagi pemilih pemula pada pemilihan bupati Aceh Selatan pada tahun 2018.
 - c. Sebagai bahan referensi peneliti berikutnya dalam pembahasan yang relevan mengenai Budaya politik mengenai partisipasi pemilih pemula.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi masyarakat sendiri, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada yang berada dalam kontes pilkada untuk membentuk karakter yang dapat memberikan daya tarik tersendiri.
 - b. Bagi timses juga dapat meningkatkan kerjasama dalam melakukan hal yang berbaur positif

- c. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan berguna bagi penulis sendiri dan orang yang membaca, khususnya bagi yang mengambil jurusan yang bersangkutan dengan judul sipenulis contohnya saja di bidang ilmu politik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Partisipasi Politik Pada Pemilukada

Partisipasi politik dan pemilih menurut Samuel P. Huntington merupakan penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta mengambil bagian dalam setiap pertanggung jawaban bersama.

Sedangkan partisipasi politik di definisikan sebagai kegiatan warga negara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Namun demikian tingkatan partisipasi politik yang berbeda dari suatu sistem politik dengan yang lain, tetapi partisipasi pada suatu tingkatan yang hirarki tidak merupakan prasyarat bagi pemilih. Selain dari itu Huntington dan Nelson mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuat keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap dan sporadis secara damai.²

Secara umum partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan cara memilih pemimpin dalam suatu wilayah secara

² Samuel P. Huntington dan Nelson. *Political Participation in Developing Countries*. Hal

langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum atau *lobbiing*.

Hal ini ditekankan bahwa, walaupun buku panduan ini tidak terlalu berfokus pada aspek-aspek partisipasi pemilihan (seperti pendaftaran pemilih dan penyelenggaraan pemilu) isu-isu ini sangatlah penting dan memiliki kelebihan masing-masing dalam pemahamannya jika isu-isu ini diberikan perhatian. Seperti bentuk pendaftaran saat memilih dan bagaimana sistem penyelenggaraan pemilu yang ingin dilakukan saat proses pemilu.

Seorang warga secara perorangan dalam kelompok besar dapat mengemukakan dua pendapat mengenai partisipasi politik di masyarakat yakni:

1. Warga beranggapan bahwa kebijakan yang ia ingini, walaupun ia sendiri tidak ikut serta, akan diwujudkan juga oleh orang-orang lain.
2. Ia beranggapan bahwa yang lain-lain, walau ia sendiri pun ikut serta, tidak akan memberi kerjasama mereka mewujudkan kebijakan yang diinginya.³

Partisipasi politik menurut Rosseau yaitu, pertama, para pengamat yang memperhatikan politik tidak hanya selama pemilu, melainkan diantara pemilu yang satu dengan pemilu yang lain. Kedua, partisipasi

³ J.van den Doel, *Demokrasi Dan Teori Kemakmuran*, Jakarta: Erlangga, 1987, Hal 49.

aktif adalah khalayak yang bukan saja mengamati, tetapi giat melakukan komunikasi dengan para pemimpin politik atau politikus, baik di pemerintahan maupun di parlemen atau di luar parlemen.

Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang yaitu, pertama, kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah. Kedua, menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik dia hidup.

Selain itu terdapat juga faktor lain yang mempengaruhi, yaitu: status sosial, status ekonomi, afiliasi politik orangtua dan pengalaman berorganisasi. Partisipasi pemilih dalam pemilu menjadi penting karena akan berdampak secara politis terhadap legitimasi sebuah pemerintahan yang dihasilkan. Legitimasi adalah syarat mutlak yang secara politik turut menentukan kuat atau lemahnya sebuah pemerintahan.

Adil dan demokratis. Partisipasi politik tidak sekadar persoalan dari sisi pemilih menggunakan hak pilihnya saat pemilu di bilik suara, tetapi juga bagaimana publik berperan dalam menciptakan proses pemilu yang kredibel dan bersih melalui keterlibatan dalam pengawasan pemilu sebagai bagian kontrol terhadap penyelenggaraan pemilu itu sendiri.⁴

Dalam negara berkembang masalah partisipasi adalah masalah yang cukup rumit, Partisipasi menjadi tolak ukur penerimaan atas sistem

⁴ jurnal di akses pada tanggal 25 Desember 2018 dari situs
file:///C:/Users/My%20Note%20Book/Downloads/Documents/03%20JURNAL%20Bawaslu.pdf.

politik yang dibangun oleh sebuah negara maju dan berkembangnya pembangunan dalam suatu negara sangat tergantung dari keterlibatan warga negaranya tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Memahami partisipasi politik tentu sangatlah luas.

Mengingat partisipasi politik itu sendiri merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri (Berger dalam Surbakti 1992:140). Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Dinegara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi warga negara meningkat. Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintah. Keikutsertaan warga negara atau masyarakat dalam suatu kegiatan politik, tidak terlepas dengan adanya partisipasi politik dari masyarakat.

Dimana masyarakat merupakan faktor terpenting dalam menentukan pemimpin pemerintahan baik di tingkat pusat sampai pada tingkat terendah yakni desa. Maka dari itu penulis akan menguraikan definisi partisipasi yang menurut Syafiie, bahwa Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan

kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggung jawaban bersama.

Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik berdasarkan jumlah pelakunya yang dikategorikan menjadi dua yaitu partisipasi individual dan partisipasi kolektif. Partisipasi individual dapat terwujud kegiatan seperti menulis surat yang berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Partisipasi kolektif adalah bahwa kegiatan warga negara secara serentak dimaksudkan untuk mempengaruhi penguasa seperti dalam kegiatan pemilu.

Di dalam negara demokratis kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem politik merupakan syarat utama dari sebuah sistem pemerintahan demokratis yang eksistensinya banyak dipertanyakan publik, sehingga pemerintah sedapat mungkin berusaha untuk memastikan bahwa apa yang mereka katakan “pemunggaran suara” dan terlibat aktif dalam debat politik dan memberikan otoritas untuk mengetahui pandangan atau keinginan mereka tentang persoalan sesuai pengalaman mereka.

Pandangan ini yang sudah diterima secara universal mengenai prinsip partisipasi politik dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, ternyata makna dan tingkatan partisipasi politik masyarakat seringkali menjadi masalah yang menyita perhatian masyarakat, karena adanya masyarakat yang antusias dengan perkembangan perpolitikan terutama pada saat pelaksanaan pemilihan umum. Misalnya: pemilu legislatif, pemilu

presiden, dan pemilukada. Sebenarnya partisipasi politik masyarakat dalam mendukung program pemerintah secara konvensional berpusat pada sejauh mana pemerintah memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk mengakses informasi yang dibutuhkan masyarakat tentang kinerja pemerintah dan partai politik, memberikan hak dan kebebasan kepada masyarakat untuk mengajukan “usul” perbaikan terhadap kondisi sosial mereka yang secara langsung berpengaruh pada struktur dan tradisi kehidupan keluarga dan masyarakat pada umumnya.

Partisipasi politik telah menjadi salah satu studi dalam ilmu politik. Dalam buku yang ditulis oleh Verba, Scholzman, dan Brady berjudul “*Voice and Equalit. Civic Voluntarism in Amerika Politics*” menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam politik adalah jantungnya demokrasi, dan karena itu” Demokrasi adalah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan tanpa adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara bebas dalam menentukan proses pemerintahan”.

Pentingnya peningkatan partisipasi politik masyarakat dijelaskan Klein (2005) bahwa hak masyarakat berpartisipasi dalam politik adalah sesuatu hak yang dimiliki masyarakat untuk berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik dapat dilihat dari berbagai bentuk, namun yang paling umum adalah masyarakat tidak hanya saja ikut dalam pemungutan suara pada saat pemilihan umum, namun lebih jauh lagi mereka terlibat dalam kepengurusan partai politik.

Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian utama pemerintah dalam bidang politik adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat sebagai salah satu hak utama yang dimiliki masyarakat yaitu hak berpolitik. Ada dua prinsip dasar dalam menjelaskan hak partisipasi politik masyarakat menurut deklarasi hak asasi manusia tahun 1976. Setiap masyarakat harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa batasan-batasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yaitu sebagai berikut:

- a) Turut berpartisipasi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, langsung atau melalui proses pemilihan secara bebas dan respesentatif.
- b) Melakukan pemungutan suara dipilih dalam pelaksanaan pemilihan umum secara berkala yang merupakan hak universal dan memiliki persamaan dalam menyampaikan hak pilih melalui pemungutan suara secara rahasia dan jaminan kebebasan dalam mengekspresikan keinginannya melalui pemilihan umum.

Pada dasarnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum merupakan salah satu wujud tanggung jawab mereka dalam kehidupan barbangsa dan bernegara. Indonesia tidak mengenal kewajiban untuk memilih (*Compulsory vote*).⁵

Partisipasi politik dapat dibedakan menjadi empat kategori yaitu sebagai berikut:

⁵ Rahmawati Halin Dan Muhlin Lalongan, *Partisipasi Politik Masyarakat Teori Dan Praktik*. Makassar : CV Sah Media, 2016. Hal. 12-15

- a. Apatis, adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- b. Spektator, adalah orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu.
- c. Gladiator, adalah mereka yang aktif terlibat dalam proses politik misalnya komunikator, aktifis partai dan aktifis masyarakat.
- d. Pengkritik, adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond dalam Syarbaini, (2002:70) yang terbagi dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional.⁶

2.2 Bentuk-bentuk Partisipasi Politik Konvensional dan Non Konvensional

Konvensional	Non Konvensional
Pemberian suara (voting)	Pengajuan Petisi
Diskusi politik	Berdemonstrasi
Kegiatan kampanye	Konfrontasi, mogok
Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan	Tindak kekerasan politik harta benda (pengrusakan, pengeboman)

⁶Jurnal diakses pada tanggal 21 Desember 2018 dari situs Rezeky_saputra, file:///C:/Users/My%20Note%20Book/Downloads/Documents/127850-ID-partisipasi-politik-pemilih-pemula-pada.pdf.

Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrative	Tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan)
---	--

Dengan partisipasi politik diartikan sebagai usaha terorganisasi dari para warga negara untuk mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum. Dengan demikian partisipasi politik jelas tidak sama dengan mobilisasi yang digerakan oleh golongan elite untuk pemenuhan kepentingannya sendiri.

Menurut Gabriel A. Almond dalam bukunya *Comparative politics Today* melihat bahwa kecenderungan ke arah partisipasi politik rakyat yang lebih luas bermula pada masa *Renaissance* dan *Reformasi* abad XVI sampai abad XVII, dan memperoleh dorongan kuat pada *jaman terang* maupun pada masa *Revolusi Industri* di sekitar abad XVIII dan abad XIX.

2.3 Pola Partisipasi Politik

Seperti apa yang telah dikemukakan di atas, partisipasi politik adalah suatu usaha terorganisir para warga negara/masyarakat untuk mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijakan umum. Selain dari itu sudah dikemukakan juga hak untuk partisipasi dalam masalah-masalah politik, baik yang diwujudkan dalam usaha-usaha pembuatan keputusan politik, pemberian suara ataupun hak untuk menduduki jabatan

pemerintahan, dalam kenyataan hanya bisa dinikmati oleh sekelompok kecil atau minoritas masyarakat saja.⁷

Adapun pola dari partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan Nelson dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Partisipasi politik otonom

Partisipasi politik otonom ialah partisipasi politik yang dilaksanakan tanpa paksaan dan berdasarkan kemauan partisipan secara mandiri. Partisipan berpartisipasi secara sukarela tanpa ada yang menggerakkan atau memaksa.

b. Partisipasi politik mobilisasi

Partisipasi politik mobilisasi ialah partisipasi politik yang digerakan oleh pihak-pihak luar. Partisipan melaksanakan partisipasinya tidak berdasarkan kemauan dan aspirasinya sendiri, melainkan didorong oleh orang luar yang ingin mengambil kesempatan dari suatu objek yang melakukan pemilihan. Tidak hanya itu pihak luar juga salah satu pola dari partisipasi politik yang bisa mempengaruhi orang banyak.

⁷ Cheppy Haricahyono, *Ilmu Politik Dan Perspektifnya*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya 1991. Hal:172-180

Kegiatan pemberian suara dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil, karena hal itu menuntut suatu keterlibatan minimal, yang akan berhenti jika pemberian suara telah terlaksana, tanpa melihat adanya pembatasan-pembatasan lainnya, kegiatan pemberian suara itu tidak boleh dibatasi oleh seringnya pemilihan.

Dalam mempertimbangkan partisipasi politik, bagaimanapun juga terbatasnya peristiwa tersebut, harus pula ada perhatian terhadap mereka yang tidak partisipasi sama sekali dalam proses politik. Secara garis besar berbagai bentuk partisipasi politik, maka jelas bahwa pentingnya partisipasi berbeda-beda dalam satu sistem politik dengan sistem politik lain.⁸

Seperti yang dikemukakan oleh Huntington dan Nelson, Rush dan Althoff menyatakan bahwa hirarki yang terdapat partisipasi politik yaitu tergantung dari akibat yang disebabkan terdapat sistem politik. Tingkatan-tingkatan khusus menyebabkan akibat besar pada suatu sistem politik, dan akibat kecil atau tanpa mempunyai akibat apapun pada sistem lainnya. Tingkatan partisipasi politik ini disampaikan sebagai berikut:

- 1) Menduduki jabatan politik atau administratif
- 2) Mencari jabatan politik atau administratif
- 3) Keanggotaan aktif suatu organisasi politik
- 4) Keanggotaan pasif suatu organisasi politik

⁸ Michael Rush dan Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993. Hal: 129

- 5) Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (*quasi-political*)
- 6) Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik (*quasi-political*)
- 7) Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi dan sebagainya
- 8) Partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam bidang politik
- 9) *Voting* (pemberian suara)⁹

Sebelum melakukan penelitian, peneliti belum melihat dan menemukan bentuk buku dan kajian lainnya yang membahas tentang partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan bupati aceh selatan tahun 2018, namun peneliti mengadopsi dari beberapa karya ilmiah lainnya yang akan dijadikan sebagai acuan atau penguat dalam menyelesaikan penelitian ini. Beberapa dari hasil penelitian itu antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama seperti yang telah diteliti pada penelitian sebelumnya oleh Yogi Perdana Wijaya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada penelitiannya berjudul *Bentuk Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Dalam Pilpres 2014*, menyatakan bahwa hasil penelitiannya berfokus pada teori partisipasi politik, dimana pada teori tersebut dapat membantu peneliti membedah dan menganalisis apa saja bentuk faktor pendorong serta

⁹ Deden Faturahman dan Wawan sobari, *Ilmu Politik*. Malang: Universitas Muhammadiyah malang, 2004. Hal. 195

mengklasifikasikan partisipasi politik pemilih pemula yang dilakukan oleh remaja di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Sikap politik pemilih pemula dalam melakukan partisipasi dilatarbelakangi oleh keadaan sosial si pemilih pemilih pemula, seperti faktor pendidikan, keadaan ekonomi, dan keaktifan pemilih pemula dalam berorganisasi mempunyai pengaruh dominan yang secara tidak langsung dalam menentukan sikap politiknya.¹⁰

Kedua, Skripsi yang di tulis oleh Khairunnisa mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul *Partisipasi Dan Perilaku Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Presiden 2014 (Studi Pada Siswa Lembaga Pendidikan Non-Formal BTA 45 Tebet, Jakarta Selatan)*, fokus penelitian ini adalah sejauh mana partisipasi pemilih khususnya pemilih pemula disebuah Lembaga Pendidikan Non-Formal. Dimana yang menjadi ketertarikan penulis dalam penelitian ini adalah sejauh mana pengetahuan pemilih pemula terhadap sebuah pengetahuan dan tindakan politik yang diambil. Penulis juga ingin mengetahui sumber apa yang menjadi dasar pemilih pemula untuk menentua pilihan politiknya. Disamping itu atusiasme yang dimiliki oleh siswa untuk berpartisipasi dalam pemilu presiden tahun 2014 dapat dikatakan tinggi, mengingat pemilu tersebut adalah pemilu pertama bagi mereka.¹¹

¹⁰ Yogi Perdana Wijaya, *Bentuk Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Dalam Pilpres 2014*, (Sosiologi, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga) Tahun 2016

¹¹ Khairunnisa, *Partisipasi Dan Perilaku Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Presiden 2014 (Studi Pada Siswa Lembaga Pendidikan Non-Formal BTA 45 Tebet, Jakarta)* (Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah) 2017

Ketiga, skripsi yang di tulis oleh Rezeky Saputra mahasiswa Universitas Riau Pekanbaru yang berjudul *Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2014*, penelitiannya berfokus pada Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bentuk partisipasi politik konvensional, karna bentuk partisipasi politik konvensional adalah bentuk partisipasi yang umum atau yang lazim digunakan. Peneliti tidak menggunakan bentuk partisipasi politik non konvensional karena tidak mengikuti apa yang sudah menjadi kebiasaan atau tidak mengikuti peraturan yang berlaku. Bentuk partisipasi politik yang di lakukan oleh pemilih pemula di Kecamatan Mandau berupa pemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan. Berikut adalah bentuk-bentuk partisipasi yang di lakukan masyarakat dan pemilih pemula di Kecamatan Mandau.¹²

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Wahyu Rahma Dani mahasiswa Universitas Negeri Semarang, yang berjudul *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 Di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal*, yang berfokus penelitiannya pada Tingkat partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu legislatif tahun 2009 di Desa Puguh kecamatan Boja Kabupaten Kendal yaitu pemberian suara, bentuk partisipasi politik sangat antusias karena hampir 95% pemilih pemula di Desa Puguh yang terdaftar dalam DPT datang ke TPS

¹² Rezeky Saputra, *Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2014*, (Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Riau Pekanbaru) 2017

untuk menggunakan hak pilihnya. Pemilih pemula Desa Puguh melakukan kegiatan kampanye karena faktor hiburan, sedangkan untuk alasan memperhatikan isu kampanye masih minim.

Berbicara masalah politik, partisipasi politik di lakukan oleh pemilih pemula Desa Puguh biasanya dilingkungan kerja dan dilingkungan sekolah. Kegiatan ini dilakukan oleh pemilih pemula tentu saja, hal ini di pengaruhi beberapa faktor diantaranya jenis pendidikan, jenis kelamin dan status sosial.

Selain dari itu faktor penghambat pemilih pemula dalam pemilu legislatif tahun 2009 di Desa Puguh kecamatan Boja kabupaten Kendal adalah kesibukan kegiatan sehari-hari, perasaan tidak mampu, dan larangan dari pihak keluarga, sedangkan faktor pendorong politik pemilih pemula dalam pemilu legislatif tahun 2009 adalah: yang pertama rasa ingin tahu pemilih pemula yang dulunya hanya sebagai penonton proses politik pemilihan anggota legislatif, kini mereka akan menjadi pelaku atau pemilih yang akan menentukan terpilihnya seorang anggota legislatif.

Dari sinilah rasa keingininan tahun pemilih pemula untuk ikut andil dalam pesta demokrasi dan ingin merasakan cara keterlibatan langsung mereka dalam pemilu.¹³

Dari keempat rujukan di atas jelas sekali letak perbedaan yang akan diteliti oleh peneliti adalah dalam skripsi ini peneliti mencoba meneliti bagaimana partisipasi pemilih pemula dan netralitas pemilih

¹³ Wahyu Rahma Dani, *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 Di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal*, (Hukum Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang) 2010

dalam pemilihan bupati aceh selatan tahun 2018. Selain itu penelitian yang dilakukan juga memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu seperti studi kasus penelitian di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Jika dalam sebuah penelitian terdapat persamaan tema dan kajiannya dengan penelitian sebelumnya, akan tetapi lokasi penelitiannya berbeda dan akan mendapatkan hasil pasti berbeda karena karakter masyarakat dan keanekaragaman di daerah yang satu dengan yang lain juga berbeda sehingga memiliki pendapat tentang partisipasi politik yang berbeda pula.

Selain itu jelas sekali bahwa dari keempat penelitian terdahulu semua terdapat perbedaan diantaranya dari segi karakteristik pemilih pemula dan bagaimana cara mereka dalam melakukan pemilihan, sampai pada faktor penghambat dan pendorong pemilih pemula dalam memberi hak suara. Alhasil faktor pendorong menurut salah satu peneliti terdahulu adalah seperti faktor pendidikan, keadaan ekonomi, dan keaktifan pemilih pemula dalam berorganisasi mempunyai pengaruh dominan yang secara tidak langsung dalam menentukan sikap politiknya. Sedangkan faktor penghambat pemilih pemula adalah kesibukan kegiatan sehari-hari, perasaan tidak mampu, dan larangan dari pihak keluarga.

2.4 Kendala Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati Aceh Selatan 2018

Dalam undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum disebutkan bahwa pemilih pemula adalah mereka yang baru pertama kali untuk memilih dan telah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah menikah mempunyai hak memilih dalam pemilihan umum. Kemudian pasal

19 ayat (1 dan 2) UU No. 10 tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga Negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntunan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun yang termasuk kategori pemilih pemula adalah sebagai berikut:

- a) Seorang warga yang belum pernah memilih dan sudah berumur 17 tahun keatas sudah memiliki ktp.
- b) Seorang warga yang sudah pernah menikah, walaupun belum berumur 17 tahun.
- c) Seorang pensiunan TNI atau ABRI yang belum pernah memilih.

Pemilih pemula merupakan subjek dan objek dalam kegiatan politik, dalam kegiatan politik termasuk didalamnya adanya kegiatan pemilihan umum. Pemilih pemula sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dalam orientasi kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya ke depan dapat berperan dalam bidang politik. Mereka sebagai penerus bangsa perlu memiliki wawasan dan pengetahuan

dalam bidang politik termasuk kegiatan pemilihan umum agar mereka jangan sampai tidak ikut berpartisipasi politik (golput) pada pelaksanaan pemilihan umum. Golput merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab atas pembangunan dan kelangsungan bangsa dan Negara.¹⁴

Bahasan mengenai masa demokrasi pancasila tidak akan lengkap jika tidak membahas golput. Menjelang pemilihan umum tahun 1977 timbul suatu gerakan di antara beberapa kelompok generasi muda, terutama mahasiswa, untuk memboikot pemilihan umum karena dianggap kurang memenuhi syarat yang diperlukan untuk melaksanakan pemilihan umum secara demokratis. Yang disebut antara lain ialah kurang adanya kebebasan-kebebasan (*civil liberties*) yang merupakan prasyarat bagi suatu pemilihan umum yang jujur dan adil. Perlu diperhatikan bahwa ada beberapa kategori pemilih pemilih resmi yang ditentukan oleh pemerintah diantaranya adalah kategori suara yang tidak sah dan kategori yang tidak menggunakan hak pilih.

Mengenai kategori tidak menggunakan hak pilih perlu disadari bahwa kategori ini sukar dihitung karena tidak hanya mencakup golput juga menyangkut orang yang tidak datang ke TPS karena sakit, atau dalam sedang perjalanan, atau yang tidak peduli.¹⁵

¹⁴ Jurnal di akses pada tanggal 25 september 2018 dari situs.
file:///C:/Users/My%20Note%20Book/Downloads/Documents/127850-ID-partisipasi-politik-pemilih-pemula-pada_2.pdf. Rezeky Saputra. *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2014*. Hal 3

¹⁵ Budiardjo, Miriam 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 479-480

Istilah golput (golongan putih) merupakan peristiwa yang fenomenal. Golput sendiri muncul tahun 1971 yang diperkenalkan oleh sejumlah aktivis dan kelompok pro demokrasi seperti Arief Budiman yang menolak terlibat dalam pemilu di masa Orde Baru. Saat itu, Pemilu dilihat sebagai kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan umum. Warga negara yang mempunyai hak pilih dipaksa untuk terlibat atau berpartisipasi sebagai pemilih. Seseorang menggunakan hak pilihnya lebih karena kewajiban atau keterpaksaan dari pada pencerminan dari sikap atau pilihan politik.¹⁶

Ada empat faktor yang memengaruhi seseorang berperilaku tidak memilih yaitu faktor psikologis, sistem politik kepercayaan, politik dan latar belakang sosial ekonomi. Penjelasan non voting dari faktor psikologis pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam dua kategori Pertama berkaitan dengan ciri ciri kepribadian seseorang, Kedua berkaitan dengan orientasi kepribadian. Penjelasan pertama melihat bahwa perilaku non voting disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran otoriter tak acuh perasaan tidak aman perasaan khawatir kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi dan semacamnya.

Orang yang memiliki kepribadian tidak toleran dan tak acuh cenderung untuk tidak memilih Dalam pemilu apa yang diperjuangkan kandidat atau partai politik tidak selalu sejalan dengan kepentingan

¹⁶Jurnal di akses pada tanggal 28 desember 2018 dari situs <https://jipsi.fisip.unikom.ac.id/jurnal/perilaku-pemilih-golput-dalam>. Tatik Rohmawati, *Perilaku Pemilih Golput Dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat Tahun 2008*, Hal. 3

perorangan secara langsung betapapun hal itu menyangkut kepentingan umum yang luas. Dalam konteks semacam ini para pemilih yang mempunyai kepribadian tidak toleran atau acuh tak acuh cenderung menarik diri dari percaturan politik langsung karena tidak berhubungan dengan kepentingannya.

Pada masa Orde Baru tumbuhnya kelompok golput lebih bersifat gerakan protes terhadap sistem dan kebijakan politik dari rezim yang ada. Menurut mereka dengan melakukan golput pemerintah akan mengetahui apa yang mereka inginkan sebenarnya.¹⁷

Munculnya golongan putih (golput) di dasarkan oleh beberapa faktor yang sering ditemukan saat diteliti. Faktor-faktor tersebut antara lain ialah sebagai berikut:

- a. Golput teknis, hal ini dikarenakan sifat teknis berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau salah mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tak sah, atau tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan teknis pendataan penyelenggaraan pemilu.
- b. Golput politis, hal ini untuk masyarakat yang tidak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau pesimistis bahwa pemilu/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan.

¹⁷ Jurnal di akses pada tanggal 01 februari 2019 dari situs <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/519/327>. Sri Yanuarti, *Golput Dan Pemilu Di Indonesia*, Hal.22-25. Pdf

- c. Golput ideologis, yang tidak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tidak mau terlibat didalamnya entah karena alasan nilai-nilai agama atau alasan politik ideologi lainnya.¹⁸

a. Perilaku Pemilih

Perilaku seorang pemilih merupakan sebuah kegiatan yang nyata dilihat, Dalam kajian perilaku pemilih hanya ada dua konsep utama, yaitu; perilaku memilih (voting behavior) dan perilaku tidak memilih (non voting behavior). David Moon mengatakan ada dua pendekatan teoritik utama dalam menjelaskan perilaku non-voting yaitu: pertama, menekankan pada karakteristik sosial dan psikologi pemilih dan karakteristik institusional sistem pemilu dan kedua, menekankan pada harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir memilih.¹⁹

Dalam pilkada langsung, masyarakat memiliki kedaulatan yang lebih besar dibandingkan pilkada secara perwakilan. Dalam pilkada kandidat kepala daerah dan pendukung-pendukungnya akan melakukan kampanye-kampanye politiknya yang bertujuan untuk menarik simpatisan warga agar memilihnya. Dalam kampanye setiap kandidat akan memaparkan visi dan misinya sehingga calon pemilih sudah mengetahui visi misinya dan program program kerjanya. yang mana agar masyarakat

¹⁸ Jurnal di akses pada tanggal 01 februari 2019 dari situs [http://ejurnal.ip.fisip.ac.id/site/wpcontent/uploads/2005/JURNAL%20RAHMAN%20RINJANI%20\(1\)%20\(01-05-15-02-32-59\).pdf](http://ejurnal.ip.fisip.ac.id/site/wpcontent/uploads/2005/JURNAL%20RAHMAN%20RINJANI%20(1)%20(01-05-15-02-32-59).pdf) Efriza, *Political Explore*, 2012.

¹⁹ Jurnal di akses pada tanggal 25 Desember 2018 di akses dari situs <https://www.researchgate.net/publication/317327991>, Pemahaman Cerdas Memilih Pemimpin Daerah di Desa Air Terbit Kabupaten Kampar Tahun 2016.

mengetahui tujuan calon kepala daerah jika dia terpilih sebagai kepala daerah. Dan setiap warga negara dan masyarakat sipil bebas memilih dan memekampanyekan atau memenangkan pasangan calon pilihannya.²⁰

Selain dari itu, netralitas pemilih dalam pemilu adalah sebuah aktivitas atau tingkahlaku dari pihak masyarakat dalam memberikan hak suaranya. Netralitas harus didasari oleh keinginan seseorang dalam bersikap adil atau tidak memihak ke atas siapapun yang menyangkut dengan pemilihan.

Adapun ciri-ciri netralitas adalah sebagai berikut:

1. Tidak memihak, artinya pihak penyelenggara atau yang mengikuti pemilu benar-benar independen, dan tidak memihak atau berat sebelah dengan pihak manapun, baik itu pihak penguasa maupun pihak yang elit atau yang berbau dengan kkn.
2. Bersifat mandiri, artinya pihak penyelenggara betul-betul mandiri tidak bergantung dengan pihak siapapun dan manapun. Tidak ada istilah yang menyetir, mengarahkan ataupun yang mengatur dengan kata lain benar-benar mandiri.
3. Berani dan tegas, artinya pihak penyelenggara pemilihan umum baaik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, pemantau, saksi-saksi maupun yang lainnya, harus berani dan tegas apabila ada yang coba bertindak tidak benar.

²⁰ Jurnal di akses pada tanggal 25 Desember dari situs <https://www.kompasiana.com/fachrial/589ea95744afbd6f1109cd17/bersifat-netralitas-dalam-pilkada>.

Jika ketiga ciri-ciri netralitas dalam pemilu baik itu dari yang Independen dan tidak memihak, bersifat mandiri tidak ada campur tangan atau tekanan dari pihak manapun serta berani menindak dengan tegas, apabila ada pelanggaran. Pentingnya menjaga netralitas juga semestinya dijadikan sebagai suatu paham yang harus di junjung tinggi oleh pemerintah sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik serta dapat menjalankan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Netralitas adalah keadaan dan sikap netral (tidak memihak dan bebas) dalam melakukan segala hal yang merupakan keinginan seorang individu yang bermakna bebas dalam mengambil keputusan tidak memihak ke atas siapapun. Netralitas disini berpacu pada netralitas pemilih pemula dalam melakukan pemilihan baik Legislatif Maupun Eksekutif yang berperan sebagai pemilih pemula yang di mulai dari umur 17 tahun sampai 21 tahun.

Selalu menjadi tolak ukur dalam pemilihan, dikarenakan pemilih pemula tersebut belum mempunyai pengalaman dalam melakukan pemilihan yang menjadi kewajiban bagi masyarakat yang sudah berhak memilih sebagai mana yang telah diterapkan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum.

Pemilih pemula adalah pemilih yang ikut andil menentukan pemimpin di suatu daerah. Perilaku pemilih pemula menjadi indikator kualitas demokrasi secara substansial pada saat ini dan masa akan datang. Karena kondisinya masih labil dan mudah di pengaruhi oleh kalangan-kalangan politik dan Timsesnya.

Untuk melihat perilaku pemilih pemula ada beberapa pendekatan yang dilihat Menurut Rerni.f Kavanagh melalui buku-nya yang berjudul *Political Science and Political Behavior*, menyatakan terdapat tiga model untuk menganalisis perilaku pemilih. yaitu pendekatan sosiologis, psikologi sosial, dan pilihan rasional.²¹

Dalam hal ini masyarakat harus diyakinkan bahwa pilkada benar-benar dengan mekanisme dan proses yang telah ditetapkan dan dapatdi terima sebagai konsekuensi, karena masyarakat tidak mudah percaya inilah yang memantik dan membuka celah kerawanan dalam melakukan kecurangan.²²

Berdasarkan Pasal 22E tersebut, konstitusi menegaskan tiga prinsip penyelenggaraan pemilu yaitu yang pertama, asas pemilu adalah langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil); kedua, pemilu dilakukan lima tahun sekali untuk memilih anggota lembaga legislatif, presiden dan wakil presiden; ketiga, penyelenggara pemilu adalah suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

²¹ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Widisarana Indonesia, 2007, hal. 14

²² Jurnal di akses pada tanggal 20 mei 2018 -pemilih pemula-2013.html (<https://nasriaika1125.wordpress.com/2013>)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah dimana tempat dan sumber penelitian yang ingin diteliti dan mempunyai nilai guna yang tinggi dalam menyelesaikan proposal Ilmiah ini. Adapun lokasi penelitian yang akan diteliti di Kabupaten Aceh Selatan, yaitu salah satu dari 18 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Aceh Selatan.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dimana dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang dimiliki dengan menggambarkan atau melukiskan subjek atau objek penelitian seseorang atau lembaga masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang dilihat atau sebagaimana adanya. Penelitian Deskriptif melakukan analisis dan menyajikan data-data dan fakta-fakta secara sistematis sehingga dapat dipahami dan disimpulkan.

Tujuan penelitian Deskriptif analisis adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Selain itu penelitian ini juga menggunakan teori-teori, data-data dan konsep-konsep sebagai kerangka acuan untuk menjelaskan hasil penelitian menganalisis dan sekaligus menjawab persoalan yang diteliti.

3.3 Jenis Penelitian

Oleh karena itu jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif di golongan ke dalam penelitian subjektif, reflektif atau interpretatif yang berbeda dengan penelitian kuantitatif.

Melalui studi kasus diharapkan model yang dihasilkan pada Kabupaten/Kota lokasi penelitian akan dapat dipresentasikan atau digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan kasus-kasus serupa di Kabupaten atau kota lain.²³

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah Partisipasi Pemilih Pemula dan Bagaimana Netralitas Pemilih Pemula pada Pemilihan Bupati Aceh Selatan pada tahun 2018.

3.4 Pendekatan Dalam Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan ini adalah pendekatan rasional choices. Rational choices adalah individu sebagai aktor terpenting dalam dunia politik mereka dianggap manusia sempurna sebagai makhluk rasional yang selalu mempunyai tujuan-tujuan yang mencerminkan apa yang dianggapnya kepentingan diri sendiri dan ia melakukan hal itu dalam situasi terbatas sumber daya pikir dan sebari dari itu ia membuat pilihan untuk menetapkan sikap dan tidakan yang efesien. Dalam hal ini ia harus

²³ Sudartjo, *Metedologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) Hal.

memilih diantara beberapa pilihan yang akan membawa keuntungan dan kegunaan yang paling bermanfaat baginya.

3.5 Penentuan Informan/Teknik Penetapan Sample

Informasi dirangkul dari sebagian warga masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Selatan yang sebagai Pemilih Pemula Dan Bagaimana netralitas mereka dalam memilih Bupati pada Kabupaten Aceh Selatan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data primer yang didasarkan pada peninjauan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Studi lapangan yang dilakukan dengan Daring langsung ke lokasi penelitian dengan cara mewawancarai beberapa Tokoh masyarakat dan Tokoh pemuda yang menjadi Pemilih Pemula.
2. Data sekunder yaitu dengan mencari sumber data dan informasi melalui buku-buku, jurnal, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan dengan penelitian ini.

Adapun untuk memperoleh data diantaranya ada dua yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara periset dengan responden, dimana jawaban responden akan menjadi data mentah. Dengan wawancara mungkin juga membantu dalam proses pengidentifikasikan dokument mana yang penting, perlu di baca, dan ditindaklanjuti, selain itu wawancara dapat

mengisi kesenjangan dalam pendokumentasian terutama setelah ini makin dekat orang menulis surat dan catatan harian. Adapun informan yang diambil yaitu pemilih pemula dan salah satu tim sukses yang berada di Aceh Selatan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam berbentuk pengambilan gambar yang dilakukan saat penelitian itu berlangsung. Gambar yang di ambil akan memberi penjelasan secara langsung serta akan dijelaskan lebih lanjut secara sistematis oleh peneliti.

Dengan melakukan dokumentasi lebih mudah untuk orang lain memahaminya, dan selain itu melakukan dokumentasi juga sebagai bukti yang akurat sipeneliti bahwa yang di paparkan dalam sebuah tulisan Ilmiah akan lebih meyakinkan orang lain saat melihat tulisannya.

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

3.7 Teknik Analisa Data

Analisa data yang akan diperoleh ini dilakukan dengan cara data kualitatif, dengan teknik deskriptif. Data yang dikumpulkan kemudian disusun dianalisa dan disajikan untuk memperoleh gambaran sistematis tentang kondisi dan situasi yang ada. Data-data tersebut diolah dan dieksplorasi secara mendalam yang selanjutnya akan menghasilkan

kesimpulannya dengan hasil pengamatan yang diteliti secara langsung dan juga dibantu dengan studi perpustakaan.

Pada analisa data akan di klarifikasikan dengan menggunakan cara yang jelas dan menjelaskan seluruh fenomena politik yang berkaitan dengan masalah penelitian.²⁴



²⁴ Lisa Harrison, *Metedologi Penelitian Politik*.,hal 116

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Peta Politik Di Kabupaten Aceh Selatan

Menyangkut dengan peta politik di Aceh Selatan salah satunya adalah pilkada, dimana pilkada merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu yang hidup dalam suatu daerah. Di Aceh Selatan melakukan pemilihan bupati periode 2019-2023 yang diselenggarakan pada tahun 2018 sudah mulai efektif terhadap kesadaran masyarakatnya.

Tiga Suku yang terdapat di Aceh Selatan antara lain sebagai berikut :

1. Suku Aceh, yang terdiri atas : Labuhan haji barat, Sawang, Meukek, Pasie raja, Kluet utara, Bakongan, Bakongan timur, Kota bahagia, Trumon dan Trumon tengah suku bangsa kecamatan Trumon timur.
2. Suku aneuk Jamee, yang terdiri atas : Kluet selatan, Labuhan haji, Labuhan haji timur, Samadua dan Tapak tuan.
3. Suku Kluet, yang terdiri atas : Kluet timur, Kluet tengah, Kluet utara (mayoritas suku AR - R A N I R Y
4. aceh), Kluet selatan (mayoritas suku aneuk jamee).

Pembentukan Kabupaten Aceh Selatan ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 pada 4 November 1956. Berbicara agama di Kabupaten Aceh Selatan bisa dipastikan 99,99% penganut agama Islam, hal ini pertama sekali terjadi

saat masuknya Islam pertama sekali di Samudera Pasai melalui jalur perdagangan.

Kabupaten Aceh Selatan memiliki 18 buah kecamatan yang terbentang mulai dari Kecamatan Labuhan Haji yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya hingga Kecamatan Trumon Timur yang berbatasan dengan Kota Subulussalam.

a. Budaya Politik Di Kabupaten Aceh Selatan

Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suasana zaman saat itu dan tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Artinya, budaya politik yang berkembang dalam suatu wilayah dilatarbelakangi oleh situasi, kondisi, dan pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Terutama pelaku politik yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam membuat kebijakan, sehingga budaya politik yang berkembang dalam masyarakat suatu wilayah akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Secara teoretik, budaya politik juga dapat diartikan aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, takhayul, dan mitos. Kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat dalam memberikan rasionalisasi untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain. Perbedaan budaya politik dalam masyarakat secara garis besar dapat dibedakan dalam tiga budaya politik, yaitu budaya politik apatis (acuh, masa bodoh, pasif), budaya politik mobilisasi (didorong atau sengaja dimobilisasi), dan budaya politik partisipatif (aktif). Perbedaan budaya

politik yang berkembang dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya :

- a. Tingkat pendidikan masyarakat sebagai kunci utama perkembangan budaya politik masyarakat.
- b. Tingkat ekonomi masyarakat semakin tinggi tingkat ekonomi/ sejahtera masyarakat, maka partisipasi masyarakat pun semakin besar.
- c. Reformasi politik/political will (semangat merevisi dan mengadopsi sistem politik yang lebih baik).
- d. Supremasi hukum (adanya penegakan hukum yang adil, independen, dan bebas).
- e. Media komunikasi yang independen (berfungsi sebagai kontrol sosial, bebas, dan mandiri).²⁵

Pasang surut budaya politik yang terdapat di Aceh Selatan dari tahun ketahun bisa dilihat, bahwa budaya politik yang ada di Aceh Selatan mengalami fase-fase dimana disaat menjelang pemilu baik pemilihan legislatif ataupun pemilihan presiden sebagian dari masyarakat cukup antusias dalam menyambut pesta demokrasi. Tidak semua masyarakat ikut serta, akan tetapi mayoritas lebih banyak yang sadar politik dibandingkan yang apatis.

Pada tahun 2013 partisipasi masyarakat dalam memilih berkurang berkisar lebih kurang tujuh ribu orang. Dalam hal ini ada beberapa

²⁵ Khoirul Saleh dan Achmat Munif, di akses pada tanggal 15 januari 2019. Dari situs file:///C:/Users/My%20Note%20Book/Downloads/Documents/53625-ID-membangun-karakter-budaya-politik-dalam-Berdemokrasi.pdf.

pendapat yang ditemukan oleh peneliti yang pertama, dikarenakan bahwa masyarakat lebih mementingkan pekerjaan mereka daripada memberikan hak suara mereka. Kedua, sebagian masyarakat berfikir bahwa jika mereka melakukan pemilihan akan membuang waktu mereka dalam bekerja, karena bagi mereka memilih atau tidaknya sama saja tidak merubah mereka menjadi lebih, baik dari segi ekonomi maupun lapangan pekerjaan.

Partai Aceh lainnya, ketika melakukan kampanye lebih memilih menampilkan dan menghadirkan artis-artis ibu kota dengan bernyanyi untuk menghibur masyarakat yang hadir di lapangan ketika kampanye berlangsung. Beda halnya dengan Partai Aceh yang ada di Aceh Selatan, mereka lebih memilih menampilkan hiburan yang bersifat islami dan mengandung unsur budaya Aceh itu sendiri, yaitu tarian rapai geleng. Tujuan partai Aceh di Kabupaten Aceh Selatan menampilkan tarian ini adalah karena selain untuk menghibur tarian ini berasal dari Kabupaten sendiri agar budaya yang telah ada jangan sampai hilang, juga bertujuan agar masyarakat bisa menangkap isi-isi dari pesan dakwah dan makna perjuangan yang terkandung dalam tarian ini, baik yang bersifat verbal maupun nonverbal. Maka dari itu masyarakat Aceh Selatan sendiri memiliki karakter politik yang berbeda dari yang lain.

Budaya politik yang diterapkan di Aceh Selatan sudah menjadi kebiasaan kaum elit dalam melakukan interaksi antar masyarakat dengan pemerintah untuk mengikuti arus perpolitikan mereka. Pada dasarnya hal ini kelihatan biasa saja, tanpa ada unsur keterpaksaan dalam diri

masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan sendiri. Sejumlah kaum elit memanfaatkan kebudayaan itu sendiri dengan cara mereka, baik di dalam lingkungan organisasi mereka maupun di ranah masyarakat.

Saat musim politik berlangsung, para kandidat berlomba-lomba menampilkan hiburan politiknya dalam kampanye yang dilakukan sebelum masa pemilihan. Disini masyarakat bebas berdatangan untuk menikmati dan ikut berpartisipasi dalam acara tersebut, tidak hanya itu fasilitas dan konsumsi juga disediakan oleh koordinator tim kandidat yang ingin menyampaikan visi dan misi mereka di depan semua masyarakat yang hadir.

Bahkan dalam pemilihan bupati tahun 2018 lalu, salah satu kandidat memberikan fasilitas gratis berupa bahan bakar minyak (BBM) khususnya bagi masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam menyukseskan kampanye pada saat itu. Tetapi tidak semua juga mendapatkan fasilitas tersebut, dikarenakan sebagian masyarakat masih ragu-ragu atas apa yang mereka dengar. Dalam hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua yang ikut mendapatkan fasilitas tersebut akan memilih calon kandidat yang telah memberikan fasilitas gratis pada saat itu.

b. Pendidikan Politik

Pendidikan politik adalah bagian dari sosialisasi politik khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Selain itu pendidikan politik juga disebut sosialisasi

politik adalah bagian langsung dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Selain itu ada juga terdapat bentuk-bentuk proses pendidikan politik yaitu: pertama, bentuk dan proses yang bersifat laten atau tersembunyi dimana kegiatan atau aktivitasnya berlangsung dalam lembaga-lembaga sosial non politis seperti lingkungan keluarga, lingkungan sosial dan keagamaan, lingkungan kerja maupun lingkungan sekolah dan kampus. Kedua, bentuk dan proses yang bersifat terbuka di mana aktivitasnya berlangsung dalam lembaga politis tertentu (termasuk pemilu dan perangkat-perangkatnya).²⁶

4.2 Partisipasi Pemilih Pemula Di Aceh Selatan

Secara umum presentase partisipasi masyarakat Aceh Selatan pada Pilkada tahun 2018 berdasarkan dari berbagai sumber data yang ditemukan sebagai berikut :

Tabel 1 Partisipasi Pengguna Hak Suara Tahun 2018

Laki-laki	87,07 %
Perempuan	85,29 %
Total	84,21 %

Berdasarkan tabel 2 di atas menjelaskan bahwa partisipasi pengguna hak suara pada tahun 2018 menunjukkan bahwa pemilih laki-laki berjumlah sekitar 87,07 %, sedangkan jumlah pemilih perempuan berjumlah sekitar 85,29 % dan total dari keseluruhan adalah berjumlah

²⁶ Jurnal diakses pada tanggal 01 januari 2019 dari situs http://www.researchgate.net/publication/327503165_Konsep_Pendidikan_Bagi_Pemilih_Pemula_melalui_Pendidikan_Kewarganegaraans

84,21 % Hal ini membuktikan bahwa partisipasi pengguna hak suara pada pilkada Kabupaten Aceh Selatan sudah mulai efektif.

Tujuan pilkada serentak adalah sebagai upaya terciptanya efektivitas dan efisiensi. Baik efisiensi biaya politik, kasus-kasus politik dapat ditekan, maupun berkait regulasi dan perangkat pelaksanaan pilkada serentak. Karenanya banyak persiapan yang dilakukan Diharapkan pelaksanaan pilkada serentak terbangunnya persaingan yang bersih dan sehat.²⁷

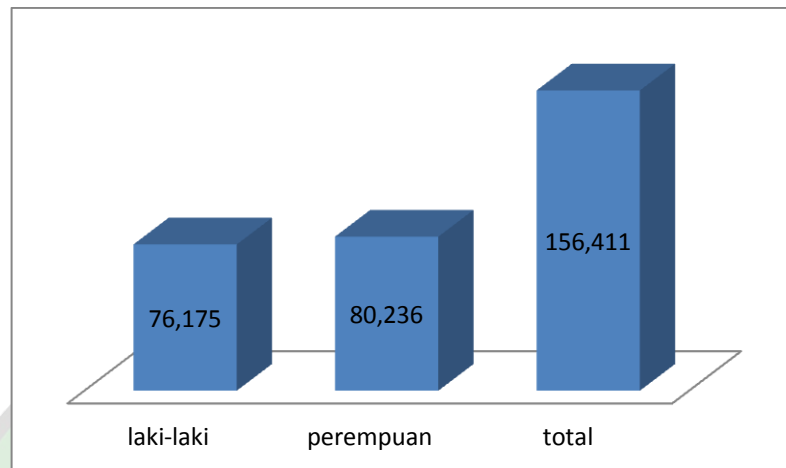
Tabel 3. Pemilih DPT Tahun 2018

Laki-laki	73,355 %
Perempuan	77,553 %
Total	150,908 %

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa hasil pemilih DPT tahun 2018 menjelaskan bahwa pemilih laki laki sekitar 73,355 %. Pemilih perempuan sekitar 77,553 % dan totalnya sekitar 150,908 %. Hal ini dapat disimpulkan bahwa lebih banyak yang memilih yaitu perempuan dibandingkan laki-laki. Ini juga dapat membuktikan bahwa partisipasi lebih tinggi dari kalangan perempuan.

²⁷ Jurnal diakses pada tanggal 23 juli 2018. Dari situs <http://www.dialeksis.com/indepth/liputan-khusus-pilkada-aceh-2018-bagian-i>,

Tabel 4. Jumlah Pemilih Tahun 2018



Dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pemilih yang tercatat laki-laki berjumlah 76.175, sedangkan yang perempuan berjumlah sekitar 80.236, dan untuk total semuanya adalah 156.411.

“ Hasil wawancara dari salah satu pemilih pemula yang berumur 18 tahun kecamatan pasie raja mengatakan bahwa alasan dari dia tidak memilih adalah bagi mereka memilih atau tidaknya keadaan dalam kehidupan mereka sama saja, jadi bagi mereka memilih diwaktu pilkada tidak bisa menentukan kehidupan mereka kedepan nya”.

“Dan hasil wawancara dengan pemilih pemula yang bernama Siti Azura mengatakan bahwa alasan dirinya memilih dikarenakan dilihat dari sosok kepemimpinan dari calon yang ingin dipilih sudah memenuhi kriteria seorang pemimpin, ia cukup berharap kandidat itu terpilih dan menjadi bupati di Aceh selatan mendatang. Ia juga mengatakan bahwa tidak semua masyarakat memberi suara dilihat dari apa yang sudah diberikan oleh kandidat tersebut.

Kandidat dan serangan fajar. Seperti yang kita ketahui bahwa pemilih pemula sendiri cukup mudah dipengaruhi apa lagi ditambah pengetahuan Politik mereka yang masih dangkal, yang belum bisa memilah yang pantas dijadikan pemimpin atau yang tidak.”²⁸

Hal ini juga di dukung oleh hasil wawancara dengan responden yang berada di Kecamatan Pasie Raja yang mengatakan sebagai berikut :

²⁸ Wawancara dengan pemilih pemula yang berada di Kecamatan Kluet Utara diakses pada tanggal 20 juli 2018

“ Saya salah satu pemilih pemula yang bernama Fitriani yang baru pertama kali memilih, dan saya ikut memilih pada pilkada 2018. Seorang pemilih perdana seperti saya sangat awam karena belum berpengalaman. Dibalik butanya mengenai perpolitikan saya sadar bahwa saya seorang warga yang diwajibkan atas saya memilih seorang Pemimpin. Menjelang pemilihan cukup banyak timses-timses dari berbagai kandidat yang apabila saya jumpa dengan mereka berbagai kata mereka fahamkan ke saya supaya saya terpengaruh untuk ikut dengan mereka.”²⁹

Selain dari itu, ada juga dari salah satu Responden saya mengatakan bahwa :

“ Saya pemilih pemula yang berumur 18 tahun melihat bahwa dorongan-dorongan untuk memilih sangat berpengaruh bagi saya. Di karenakan saya sendiri belum faham keuntungan memilih atau tidaknya. Bagi saya sendiri siapapun yang akan menjadi Pemimpin ke depan harus lebih mementingkan rakyatnya dan tidak selalu menjual visi-misi yang dapat mempengaruhi fikiran orang seperti saya yang belum faham dengan politik.”³⁰

Tidak hanya dari kalangan pemilih pemula yang menjadi responden peneliti, juga ada dari salah satu tim sukses yang cukup berpengaruh bagi dalam memilih, ia menyatakan bahwa sebagai berikut:

” Wawancara dengan salah satu tim sukses yang berumur 45 tahun salah seorang tim dari kandidat terpilih, disini saya melihat bahwa partisipasi yang diberikann oleh masyarakat sudah cukup baik, dari kalangan pemilih pemula maupun masyarakat lainnya. Selain dari itu kenetralitasan yang terdapat saat memilih tidak terlalu buruk, karena saya lihat masyarakat sudah mulai berfikir untuk kedepannya supaya lebih baik. Oleh sebab itu saya sendiri tidak ada dorongan dari orang lain dalam menentukan pilihan saya, apalagi disini saya dipercaya menjadi anggota tim kemenangan dalam pemilihan bupati Aceh Selatan tahun 2018

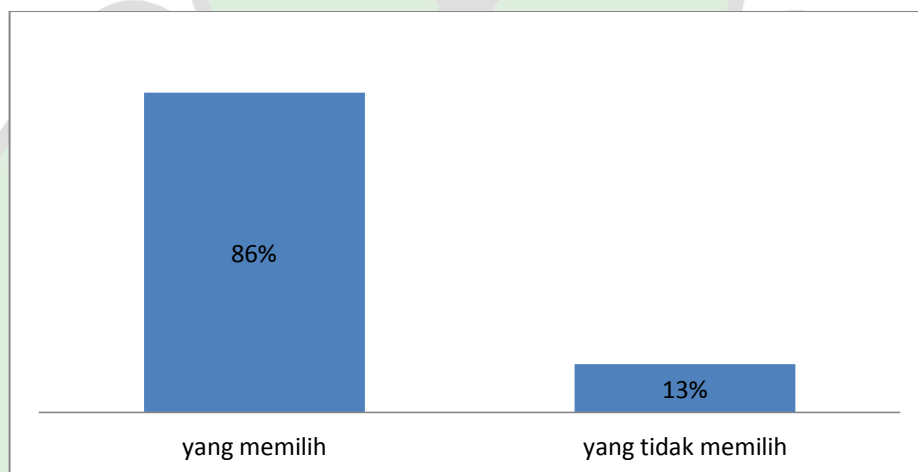
²⁹ Wawancara dengan pemilih pemula di kecamatan Pasie Raja diakses pada tanggal 23 juli 2018 di Aceh Selatan

³⁰ Wawancara dengan pemilih pemula di Kecamatan Kluet Utara diakses pada Tanggal 26 juli 2018 di Aceh Selatan

4.3 Motivasi Pemilih Pemula Dalam Memberikan Suara

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pemilih pemula yang memilih dan tidak memilih pada pemilihan bupati Aceh Selatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Pemilih Pemula Yang Memberikan Hak Suara Dan Tidak Memberikan Suara



Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan bupati Aceh Selatan menyatakan bahwa partisipasi pemilih pemula itu cukup tinggi. Dilihat dari semangat mereka untuk berpartisipasi disebabkan oleh mereka ingin memilih pemimpin yang lebih berdaulat dan mengerti tentang aspirasi masyarakatnya yang berada di Aceh Selatan.

Selain dari itu mereka juga mengatakan bahwa memilih seorang pemimpin itu lebih mengutamakan dari segi pendidikan, hal ini juga penting dalam mencari pemimpin yang memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang layak memimpin daerahnya.

Hal ini juga di dukung oleh salah satu hasil wawancara dengan salah satu responden yang berada di kecamatan Pasie Raja:

“saya salah satu pemilih pemula yang berumur 18 tahun yang berada di kecamatan pasie raja, saya memeberikan hak suara saya dalam pemilihan bupati di karenakan menurut saya sendiri memilih seorang pemimpin itu harus sesuai syarat seorang pemimpin, salah satunya dilihat dari segi pendidikan mereka dan sifat tanggung jawab dari mereka dapat membuat masyarakatnya lebih bearti dalam bermasyarakat.”

Hal ini juga di dukung oleh salah satu responden yang berada di kecamatan Kluet Utara yang mengatakan bahwa:

“saya selaku pemilih pemula yang berumur 17 berada di Kecamatan Kluet Utara, alasan saya memberikan hak suara saya di pemilihan bupati Aceh Selatan di karenakan saya melihat seorang pemimpin harus mempunyai pendidikan yang tinggi dan tidak buta huruf apabila saat memimpin mereka dapat memilah yang mana pantas di diperbuat dalam daerahnya dan yang mana hal yang tidak pantas dilakukan. Bagi saya sendiri memilih seorang pemimpin itu harus sesuai dengan keinginan masyarakat tidak hanya dilihat dari segi pendidikan saja, tetapi juga dilihat dari cara seorang kandidat dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakatnya.”

Hal ini dapat disimpulkan dari wawancara di atas pemilih pemula Aceh Selatan mengatakan mereka memberikan hak suara mereka ini adalah salah satu kewajiban sebagai warga negara yang harus dilakukan oleh setiap individu yang berdomisili sebagai warga setempat. Selain dari itu para kandidat harus mempunyai daya tarik yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat sehingga dari hal ini cukup diperlukan bahwa pendidikan dari seorang kandidat itu harus tinggi, sehingga apabila dapat menduduki kursi pemimpin kedepannya mereka mempunyai rasa bertanggung jawab.

Pemilih pemula di Kabupaten Aceh Selatan juga menginginkan bahwa pemimpin harus dapat memberi contoh akhlak terpuji dan berbudi

pekerti terhadap masyarakatnya baik itu dari segi bicara mau dari segi perlakuan mereka saat memimpin.³¹

Adapun jumlah pemilih di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2013-2018 sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2013 jumlah pemilih di Aceh Selatan tercatat 147,862 orang
- b. Dan pada tahun 2018 jumlah pemilih di Aceh Selatan mengalami kenaikan yang signifikan tercatat sejumlah 156,441 orang memilih.

Dari penjelasan di atas menjelaskan bahwa partisipasi jumlah pemilih bupati di Aceh Selatan sudah mulai baik dan perlu ditingkatkan lagi. Hal ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat pada tahun 2013 ke 2018 mengalami peningkatan yang signifikan.

4.5 Netralitas Pemilih Pemula Dalam Memberikan Suara

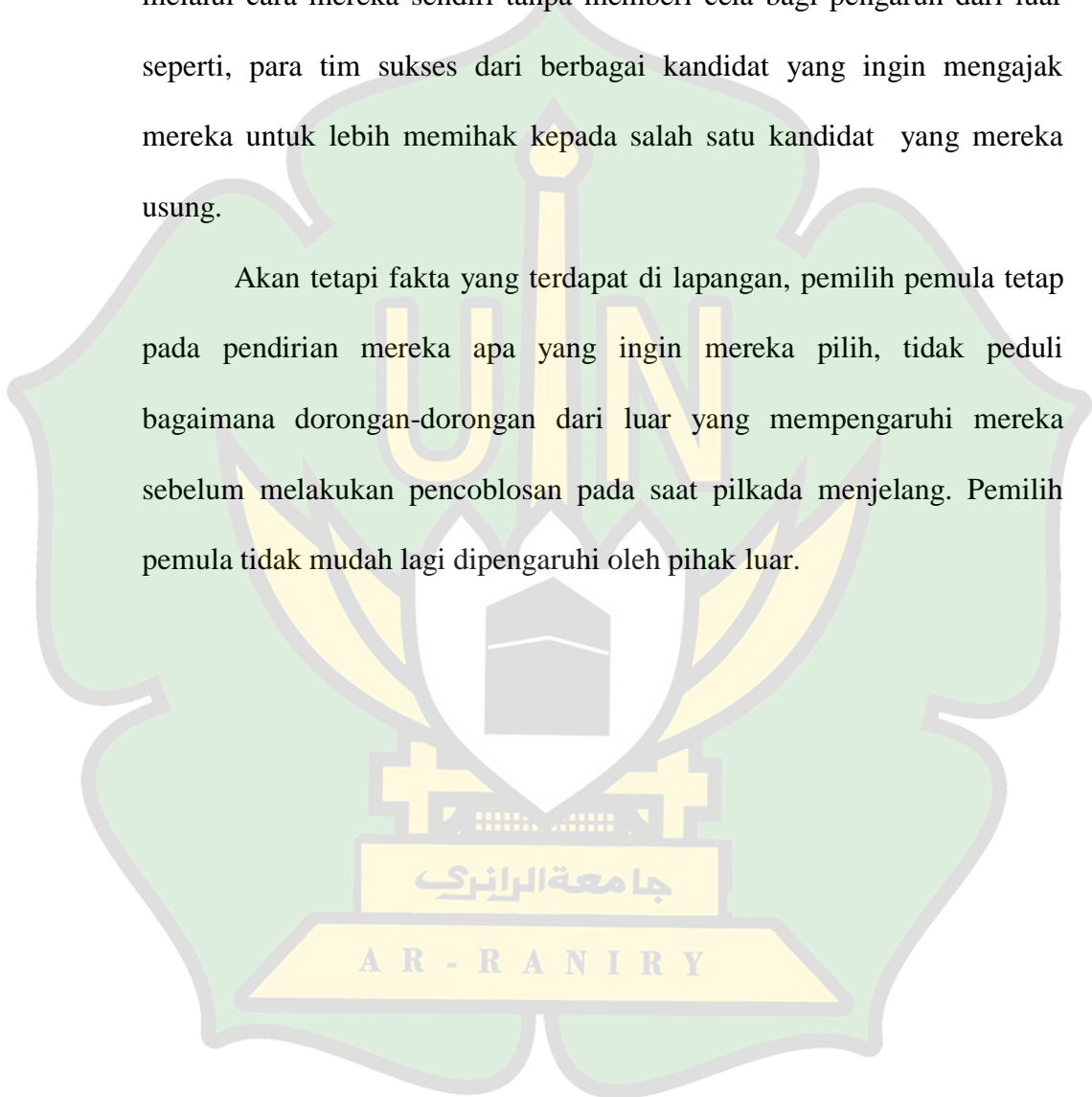
Tingkat netralitas seseorang dalam memilih sebenarnya tidak mudah diukur, akan tetapi dilihat dari bagaimana mereka melakukan sebuah keinginan untuk ikut berpartisipasi secara adil tidak memihak atas siapapun baik itu dari kalangan keluarga maupun unsur lainnya. Tetapi saat peneliti meneliti tentang sejauh mana netralitas pemilih pemula dalam memilih, peneliti dapat menyimpulkan bahwa saat melakukan pemilihan sudah banyak pemilih pemula yang sadar akan kewajiban mereka yang sudah menginjak 17 tahun keatas. Bagi pemilih pemula sendiri saat

³¹ Wawancara dengan masyarakat yang berada di Kecamatan Pasie Raja diakses pada tanggal 23 juli 2018 di Aceh Selatan

melakukan pemilihan mereka tidak terlalu peduli dengan orang-orang yang ingin menjadi pengontrol saat mereka memilih.

Salah satu cara pemilih pemula menentukan sikapnya adalah melalui cara mereka sendiri tanpa memberi cela bagi pengaruh dari luar seperti, para tim sukses dari berbagai kandidat yang ingin mengajak mereka untuk lebih memihak kepada salah satu kandidat yang mereka usung.

Akan tetapi fakta yang terdapat di lapangan, pemilih pemula tetap pada pendirian mereka apa yang ingin mereka pilih, tidak peduli bagaimana dorongan-dorongan dari luar yang mempengaruhi mereka sebelum melakukan pencoblosan pada saat pilkada menjelang. Pemilih pemula tidak mudah lagi dipengaruhi oleh pihak luar.



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di atas maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2018 cukup rendah, akan tetapi tidak berdampak pada kenetralitas pemilih pemula dalam pemilihan Bupati di Aceh Selatan.
2. Motivasi pada pemilih pemula terhadap berpartisipasi mereka tergolong tinggi, hal ini disebabkan karena kepedulian pemilih pemula sudah mulai efektif dan tidak mudah percaya dengan dorongan dari orang luar yang tidak bermanfaat sama sekali.
3. Saat melakukan pemilihan, pemilih pemula sudah mulai sadar atas kewajiban yang harus mereka lakukan sebagai warga negara yang sudah memiliki hak pilih dalam sebuah wadah demokrasi.

5.2 SARAN

1. Diharapkan bagi pihak-pihak yang tertarik dengan penelitian ini untuk dapat melakukan penelitian lanjutan dengan metode yang lebih akurat agar mendapat hasil yang lebih akurat untuk menunjang suatu pembelajaran bagi kita semua.
2. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi kajian awal pemerintah untuk meningkatkan kepedulian pendidikan politik untuk pemilih pemula, sehingga pemilih pemula tidak mudah terpengaruh oleh politik uang dan

budaya politik kotor lainnya, dan terbentuknya netralitas dapat melakukan pemilihan yang lebih baik kedepannya.

3. Pertahankan konsep pemilih pemula pada tahun 2018 dapat memberikan motivasi bagi pemilih pemula yang akan datang, apabila di saat terselenggaranya pilkada selanjutnya akan menjadi lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis, dkk. (2006). "Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Dengan Memanfaatkan Alat Peraga Sains Fisika (Materi Tata Surya) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Dan Kerja Sama". *Jurnal Pend.Fisika Indonesia*, Vol. 4, No. 2, Juli.
- Abu Ahmad Dan Djoko Prasetyo. (1997). *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Bina Aksara.
- Achjar Chalil. (2009). *Pembelajaran Berbasis Fitrah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ahmad Abu Hamid. (2008). *Penyusunan Rpp (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), Materi tutorial IPlpg*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Fisika Fmipa Uny.
- Anas Sudijono. (2007). *Pengantar Statistika*. Jakarta: Raja Wali Pres.
- Andri Wicaksono. (2014). *Menulis Kreatif Sastra Dan Belajar Beberapa Model Pembelajarannya*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Asma. N. (2006). *Model Pembelajaran Kooperatif*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Ketenagaan.
- Asnelis Lubis. (2012). "Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Stad Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa Pada Materi Pokok Gerak Lurus Di Kelas X Sma Swasta Uisu Medan". *Jurnal Pendidikan Fisika*, Vol. 1, No. 1, Juni.
- Aunurrahman. (2009). *Belajar Dan Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.
- B. Suryosubroto. (2002). *Proses Mengajar Di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Effandi Zakaria. (2007). *Trend Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik*. Kuala Lumpur: Utusan Publications.
- Em Zul Fajri Dan Ratu Aprilia Senja. (2008). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Edisi Revisi, Cet.3*. Semarang: Difa Publishers.
- Fitria Khansanah. "Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Students Teams Achievement Division)". *Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*. Vol. 18, No. 2.
- Husaini Usman. (2006). *Pengantar Statistika*. Yogyakarta: Bumi Aksara.

- Indragiri. (2017). *Jurnal Indragiri Volume 1*. Pekanbaru: Indragiri Tm.
- Les Parssons. *Bullied Teacher Bullied Student*. Bandung: Grasindo.
- Made Wena. (2011). *Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Anas. (2014). *Mengenal Metode Pembelajaran*. Jakarta: Isbn.
- Muhibbin Syah. (2005). *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Indonesia.
- Mulyani Sumantri Dan Johar Permana. (2001). *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung: Cv. Maulan.
- Mulyasa, E. (20014). *Menjadi Guru Profesional (Menciptakan Pembelajaran Kreatif Dan Menyenangkan)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa. (2006). *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir. (2005). *Metode Penelitian*. Bandung: Tarsito.
- Ns. Roymond H. Simamora. (2009). *Buku Ajar Pendidikan Dalam Keperawatan*. Jakarta: Egc.
- Nur Citra Utomo Dan C. Novi Primiani (2009). *Model-Model Pembelajaran Tipe Stad*. Bandung: Itb.
- Siregar, S. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Slavin, Robert E. (2010). *Cooperatif Learning*, Diterjemahkan Oleh: Narulita Yusron. Bandung: Nusa Media.
- Subiyanto. (1988). *Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam*. Jakarta: Depdikbud.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kulitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikuntoro. (2010). *Prosedur Penelitian*. Yogyakarta: Rineka Cipta
- Tim Dosen Laboratorium Fisika Dasar. (2009). *Buku Ajar Fisika Dasar*. Surabaya: Universitas Wijaya Putra.
- Tim Pengembang Ilmu Pendidikan Fip-Upi. (2007). *Ilmu Dan Aplikasi Pendidikan*. Bandung: Tim Pengembang Ilmu Pendidikan Fip-Upi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas diri

1. Nama Lengkap : Elisa Justia
2. Tempat/ Tgl. Lahir : Simpang Tiga, 22 Mei 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Gampong Simpang Tiga
 - a. Kecamatan : Kluet Tengah
 - b. Kabupaten : Aceh Selatan
 - c. Provinsi : Aceh

Riwayat Pendidikan

7. SD : 2006
8. SMP : 2009
9. MAN : 2014
10. Uin-Ar-Raniry : Mauk Tahun 2014

Orang Tua

11. Nama Ayah : Azirma
12. Nama Ibu : Salamiah
13. Pekerjaan Orang Tua : Petani
14. Alamat Orang Tua : Dusun Wajar, gampong simpang tiga,

Banda Aceh 27 Desember 2019

Penulis,

AR - RANIRY

Elisa Justia